

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. 2012. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata.(Jakarta: Kencana)
- Asshiddiqie, J. (2014) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danil, H. E. 2011. *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya* (Cet. 1).
- Dwi Handayani, S. H. 2022. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas “Audi Et Alteram Partem”*. Nas Media Pustaka.
- Fedorova, M. I. 2012. *The principle of equality of arms in international criminal proceedings*. Intersentia.
- Harahap, M.Y., 2017. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Idris, M. F. 2025. *Tahapan Peradilan Pidana*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Manurung, A. & Manurung, K. Y. M. 2024. *KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI A DE CHARGE: KEDUDUKAN DAN KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM*. Yogyakarta; K-Media.
https://repository.ubharajaya.ac.id/31872/1/ebook_Kewenangan%20Pemanggilan%20Saksi%20A%20de%20Charge%20_Kedudukan%20dan%20Kuasa%20Paksa%20Oleh%20Terdakwa%20dan%20Penasehat%20Hukum.pdf
- Marzuki, P. M. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah. Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*.
- Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Primorac, D., Sokanovic, L., & Bozhinovski, A. (2024, July). Correcting Miscarriages of Justice: Innocence Project Croatia. In *Forensic Science and Molecular Anthropology: Topics Selected from 12th ISABS Conference on Forensic and Anthropological Genetics* (p. 83). BoD–Books on Demand.
- Rahardjo, S. 2009. *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Pub.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Supardi. 2023. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Wiradipradja, E. S. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Cetakan Kedua*.
- Waluyo, B. 2022. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Artikel

- Akli, Z., 2020. Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp.52-68.
<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2613>
- Almitra, I. 2013. Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir). *Verstek*, 1(3).
- Al Masyhur, S.U., Pemayun, T.I.K.M., Pertiwi, L.P.R.G. and Arta, K.G., 2021. Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana

- Korupsi Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Perspektif Hukum*, pp.16-35. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i1i.15>
- Argiya, V.S.P.M., 2013. Mengupas tuntas budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju indonesia bersih. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Aulia, M. Z. 2018. Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.
- Basri, H., 2021. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), pp.104-121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Deramayati, T.Y. and Wicaksana, S.U., 2021. Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), pp.570-591.
- Fernando, Z.J., 2021. Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), pp.67-89.
- Gosal, M. M. 2021. Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. *LEX CRIMEN*, 10(4).
- Hadiyanto, B., & Hindrato, D. M. 2014. Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Yang Tidak Dihadirkan/In Absentia Dalam Persidangan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 39 PK/pid. sus/2011). *Verstek*, 2(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38853>
- Hakim, M.A. and Fauziah, N., 2024. Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek. *JURNAL STAIZA*, 2(1 Mei), pp.10-22. <https://doi.org/10.63829/js.v2i1mei.14>
- Handayani, D. 2020. Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 385–402. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402>
- Harmain, I., Intan, D.M., Kaloko, I.F. and Wahyudi, H., 2025. DISKREPANSI PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP STANDAR HAM INTERNASIONAL: ANALISIS REFORMASI KUHP 2023 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PIDANA NASIONAL. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), pp.1-16. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11360>
- Harnowo, T., & Ali, A. 2021. PENDEKATAN KEADILAN INTEGRATIF DALAM MEMBANGUN INSTITUSI PUBLIK YANG LEGITIM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 720-742. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3131>
- Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(2), 57-72. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>.
- Karas, E.I., 2018. Reopening of proceedings in cases of trial in absentia: European legal standards and Croatian law. *EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC)*, 2, pp.291-309. <https://doi.org/10.25234/eclic/7113>
- Malara, H. 2017. EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA (TANPA HADIRNYA TERDAKWA) DALAM PROSES PERSIDANGAN ACARA PIDANA MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (UU NO. 39

- TAHUN 1999 TENTANG HAM). *LEX ET SOCIETATIS*, 5(7).
<https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18101>
- Mangoli, A. Y. 2016. Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 5(3).
- Maswandi, 2017. Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), pp.160-179.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>
- Miu, A. P. 2013. Persidangan tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia). *Lex Crimen*, 2(5).
- Nasution, R. P., Milen, S., Ramadhan, K. I., Sitorus, K., & Chandra, A. (2024). Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 117-128.
<https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.89>
- Nugroho, F. and Sinaga, N.A., 2025. Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), pp.188-203.
<https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.103>
- Nuradanta, E., & Nelson, F. M. 2022. PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN POLIGAMI. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408.
- Prayugo, H. M., Amiruddin, A., & Ufran, U. 2023. Upaya Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan In Absentia. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 747-758. <https://doi.org/10.47679/ib.2023480>.
- Putri, R. D. R., & Vitria, Y. (2024). PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN IN ABSENTIA MENURUT KUHAP FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF DEFENDANTS IN CRIME OF CORRUPTION IN IN ABSENTIA JURISDICTION. *Jurnal Duta Hukum: Vol, 1*(1).
- Risakotta, A.D., 2025. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), pp.671-680.
- Rumengan, A. R. 2022. PEMERIKSAAN IN ABSENTIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *LEX CRIMEN*, 11(1).
- Rusmanda, R. C., Iskandar, H. M., Irawan, D. Z., & Pratama, M. A. (2025). Pemikiran John Locke tentang Hak Alamiah dan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Saputri, A.S., 2023. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERADILAN IN ABSENTIA DENGAN HAK ASASI MANUSIA. *Journal of Syntax Literate*, 8(6).
- Sari, N.A.M. and Kurniawan, I.D., KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM BANDING DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA

- PENIPUAN DENGAN PASAL 241 KUHP. *Verstek*, 9(4), pp.719-726.
<https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72296>
- Setyawati, K. A., & Putra, I. P. R. A. 2025. PENYIDIKAN IN ABSENTIA SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/19dh0412>
- Siregar, R. E. A. A. 2016. Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1(1), 35-46.
<http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>
- Sitorus, S., 2018. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), pp.63-71.
- Trisnadiasa, I.N.A. and Dewi, N.K.R.K., 2020. Pemeriksaan Dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Terdakwa. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(1).
- Wardhani, S.K., 2022. Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi Secara In Absentia Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), pp.20-33.
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. 2025. Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 52-63..<https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>

Skripsi, Thesis, dan Disertasi

- Ayulin, R.J., 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Dalam Putusan Verstek Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No. 09/Pdt. G/2012/PN. Kis)*, Skripsi Universitas Medan Area, Medan. Hlm 13.
- Devoutra, R.S., 2024. *UPAYA HUKUM VERZET ATAS VERSTEK YANG TELAH DIPUTUS LEBIH DARI 9 TAHUN PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI 135/PDT. PLW/2013/PN. KPN*, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mayang, S., Kisworo, B., & Rahmi Nasutiom, A. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 292/Pdt. G/2024/PA. Crp)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu.
- Muna, A. K. 2024. *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENOLAKAN PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN: NOMOR 233/PDT. G/2023/PA. MN.)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.
- Novitasari, H., 2025. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Verstek Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.
- Sabandiyah, G. K. 2009. Putri, M. R. 2023. *PENERAPAN KEADAAN MERINGANKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM JABATAN*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.

Suarnawan, I. M. 2020. *Pemeriksaan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama> Diakses Pada 24 April 2025.

<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2014-Problematika-Hukum-Peradilan-di-Indonesia.pdf> Diakses Pada 30 Mei 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/maki-minta-kpk-sidangkan-harun-masiku-secara-in-absentia-begini-maksudnya-100817> Diakses pada 27 April 2025

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> Diakses Pada 25 November 2025

<https://pdb-lawfirm.id/menjaga-keseimbangan-hak-hak-penggugat-dan-tergugat-pasca-putusan-verstek/> Diakses Pada 25 November 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor XX, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor XX

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa/Terpidana "*In Absentia*"

Sumber Lainnya

United Nations, 1948. Universal Declaration of Human Rights. Adopted 10 December 1948. Paris: United Nations.

United Nations, 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976. New York: United Nations.

DIRECTIVE (EU) 2016/343 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings

Republik Kroasia, Criminal Procedure Code 2009 / Zakon o kaznenom postupku 2009.